

Katalog : 4601004.14

PROFIL DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI RIAU 2020



*Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau*

PROFIL DEMOKRASI INDONESIA DI PROVINSI RIAU 2020

<https://riau.bps.go.id>



Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2020

ISSN : 2657-0874

No. Publikasi : 1400.2136

Katalog : 4601004.14

Ukuran Buku : 17 Cm x 24 Cm

Jumlah Halaman : xvi + 51

Naskah :

BPS Provinsi Riau

Penyunting :

BPS Provinsi Riau

Gambar Kulit :

BPS Provinsi Riau

Diterbitkan oleh :

©BPS Provinsi Riau

Dicetak oleh : CV. MN Grafika

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Organisasi Penulisan

Pengarah :

Drs. Misfaruddin, M.Si

Editor :

Rini Apsari, S.Si, M.Si

Metalia Alfa, SST

Penulis :

Dwijotulus Saputro, SE

Setting :

Dwijotulus Saputro, SE

<https://riau.bps.go.id>


KATA PENGANTAR

Demokrasi merupakan indikator semakin majunya tatanan politik dan kehidupan berbangsa suatu negara. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat.

Publikasi Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2020 berisi data capaian IDI yang merupakan gambaran kondisi demokrasi di Provinsi Riau selama tahun 2020. Data dalam publikasi ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi Riau dalam menyusun strategi pembangunan politik yang lebih tepat, secara substansi maupun wilayah yang perlu mendapatkan prioritas. Selain itu, data IDI dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk melihat perkembangan demokrasi di Provinsi Riau.

Kepada semua pihak yang telah secara aktif berpartisipasi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, September 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau



Drs. Misfaruddin, M.Si

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------|
| Organisasi Penulisan | iii |
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi | vi |
| Daftar Tabel | xi |
| Daftar Grafik | xii |
| Ringkasan Eksekutif | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Sekilas Tentang Indeks Demokrasi Indonesia..... | 3 |
| 1.2 Urgensi Demokrasi di Indonesia | 4 |
| 1.2.1 Apa Itu IDI? | 4 |
| 1.2.2 Mengapa IDI Diperlukan? | 5 |
| 1.3 Konsep dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia | 7 |
| 1.3.1 Kerangka Konseptual IDI | 7 |
| 1.3.1.1 Aspek Kebebasan Sipil (<i>Civil Liberties</i>) | 8 |
| 1.3.1.2 Aspek Hak-Hak Politik (<i>Political Rights</i>) | 10 |
| 1.3.1.3 Aspek Lembaga Demokrasi (<i>Institutions of Democracy</i>) | 12 |

| | | |
|---------------|--|-----------|
| 1.3.2 | Metodologi IDI | 14 |
| 1.3.2.1 | Review Media dan Dokumen | 15 |
| 1.3.2.2 | <i>Focused Group Discussion</i> (FGD) | 16 |
| 1.3.2.3 | <i>Indepth Interview</i> | 16 |
| 1.3.3 | Skala Kinerja Demokrasi | 17 |
| BAB II | PROFIL IDI RIAU TAHUN 2020 | 21 |
| 2.1 | Dinamika IDI Provinsi Riau Tahun 2020 | 21 |
| 2.2 | Indeks Aspek Kebebasan Sipil | 24 |
| 2.2.1 | Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat | 27 |
| 2.2.2 | Variabel Kebebasan Berpendapat..... | 29 |
| 2.2.3 | Variabel Kebebasan Berkeyakinan | 30 |
| 2.2.4 | Variabel Kebebasan dari Diskriminasi | 31 |
| 2.3 | Indeks Aspek Hak-Hak Politik | 32 |
| 2.3.1 | Variabel Hak Memilih dan Dipilih | 33 |
| 2.3.2 | Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan | 37 |
| 2.4 | Indeks Aspek Lembaga Demokrasi | 38 |
| 2.4.1 | Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil | 40 |
| 2.4.2 | Variabel Peran DPRD | 42 |

| | | |
|---------------------------------|--|-----------|
| 2.4.3 | Variabel Peran Partai Politik | 43 |
| 2.4.4 | Variabel Peran Birokrasi Pemerintah | 43 |
| 2.4.5 | Variabel Peran Peradilan yang Independen | 44 |
| BAB III KESIMPULAN | | 49 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 51 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|-----------|---|
| Tabel 1.1 | Komponen penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Kebebasan Sipil..... 9 |
| Tabel 1.2 | Komponen Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia Aspek Hak-Hak Politik..... 11 |
| Tabel 1.3 | Komponen Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Aspek Lembaga Demokrasi..... 13 |
| Tabel 2.1 | Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil..... 26 |
| Tabel 2.2 | Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat 27 |
| Tabel 2.3 | Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berpendapat..... 29 |
| Tabel 2.4 | Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan Berkeyakinan..... 30 |
| Tabel 2.5 | Nilai Indeks Masing-masing Variabel Kebebasan dari Diskriminasi 31 |
| Tabel 2.6 | Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Hak-Hak Politik 33 |
| Tabel 2.7 | Nilai Indeks Masing-masing Variabel Hak Memilih dan Dipilih 34 |
| Tabel 2.8 | Nilai Indeks Masing-masing Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan 37 |
| Tabel 2.9 | Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek 39 |

| | | |
|------------|---|----|
| | Lembaga Demokrasi | |
| Tabel 2.10 | Nilai Indeks Masing-masing Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil..... | 41 |
| Tabel 2.11 | Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran DPRD | 42 |
| Tabel 2.12 | Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Partai Politik .. | 43 |
| Tabel 2.13 | Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Birokrasi Pemerintah..... | 44 |
| Tabel 2.14 | Nilai Indeks Masing-masing Variabel Peran Peradilan yang Independen | 45 |

DAFTAR GRAFIK

| | Halaman |
|--|---------|
| Grafik 2.1 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau, 2009–2020..... | 21 |
| Grafik 2.2 Sebaran Nilai Capaian Aspek IDI Provinsi Riau, 2009–2020..... | 23 |
| Grafik 2.3 Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel Hak Memilih dan Dipilih yang terkait Pemilihan Umum, tahun 2014 dan 2019..... | 36 |
| Grafik 2.4 Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil yang terkait Pemilihan Umum, tahun 2014 dan 2019..... | 41 |

Ringkasan Eksekutif

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau 2020 mencapai angka 76,86 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2019 yang sebesar 75,21. Capaian kinerja demokrasi Provinsi Riau masih berada pada kategori “sedang”.

Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau dari tahun 2019 ke tahun 2020 dipengaruhi oleh peningkatan Aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,93 poin (dari 85,15 menjadi 86,08), dan Aspek Hak-Hak Politik sebesar 3,72 poin (dari 61,68 menjadi 65,40), serta penurunan Aspek Lembaga Demokrasi sebesar 0,73 poin (dari 84,19 menjadi 83,46). Pada tahun 2020 terdapat empat variabel IDI yang mengalami kenaikan indeks, lima variabel yang mengalami penurunan dan dua variabel tidak mengalami perubahan. Satu dari empat variabel yang mengalami peningkatan yaitu Variabel Kebebasan Berkeyakinan.

Variabel Kebebasan Berkeyakinan merupakan variable yang mengalami kenaikan paling tinggi yaitu sebesar 7,22 poin, dari 83,55 pada 2019 menjadi 90,77 pada 2020. Hal ini mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah mulai bersikap dan berperilaku demokratis dalam urusan keagamaan dan berkeyakinan. Diikuti oleh Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan dengan kenaikan 6,52 poin (dari 52,72 menjadi 59,24). Hal ini mengindikasikan semakin berkurangnya kejadian demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan atau mengarah pada tindak kekerasan di Provinsi Riau dalam partisipasi politik selama tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu dari 5 variabel yang mengalami penurunan indeks, variabel Kebebasan dari Diskriminasi mengalami penurunan indeks terbesar yaitu sebesar 11,00 poin, dari 93,47 pada 2019 menjadi 82,47 pada 2020. Hal ini disebabkan masih adanya kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender etnis, terhadap kelompok rentan lainnya.

Penurunan tertinggi kedua terjadi pada variabel Peran DPRD yang turun 5,01 poin, dari 73,55 pada tahun 2019 menjadi 68,54 pada tahun 2020. Penurunan ini dapat terlihat dengan semakin menurunnya jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif dan Perda yang merupakan inisiatif DPRD tahun 2020. Selanjutnya penurunan tertinggi ketiga sebesar 4,88 poin, terjadi pada variabel Kebebasan Berpendapat dengan nilai 60,41 pada tahun 2019 menjadi 55,53 pada tahun 2020. Hal ini terjadi karena adanya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

PENDAHULUAN



<https://iau.bps.go.id>

Tiga Komponen

IDI



- 1.Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
- 2.Kebebasan Berpendapat
- 3.Kebebasan Berkeyakinan
- 4.Kebebasan dari Diskriminasi

- 5.Hak Memilih dan Dipilih
- 6.Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan



- 7.Pemilu yang Bebas dan Adil
- 8.Peran DPRD
- 9.Peran Partai Politik
- 10.Peran Birokrasi Pemerintah Daerah
- 11.Peradilan yang Independen

SKALA KINERJA DEMOKRASI (0-100)

- Kinerja demokrasi "Baik" (Indeks > 80)
- Kinerja demokrasi "Sedang" (Indeks 60 - 80)
- Kinerja demokrasi "Buruk" (Indeks < 60)



1 PENDAHULUAN

1.1 Sekilas Tentang Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) disusun untuk mengukur perkembangan demokrasi Provinsi di Indonesia. Selain itu, IDI dimaksudkan terutama sebagai instrumen perencanaan pembangunan politik di Indonesia. Tujuan-tujuan ini membuat IDI memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus, antara lain: bagaimana meletakkan IDI dalam konteks demokrasi dan pengukuran demokrasi, serta menjelaskan metodologi yang digunakan untuk menyusun IDI. Secara khusus, juga perlu penjelasan mengenai sekilas tren demokratisasi global, diskursus terkini tentang demokrasi di Indonesia dan urgensi IDI mengapa diperlukan.

Konsekuensi yang tak diharapkan dari demokratisasi tadi sering memunculkan sinisme terhadap demokrasi; dan bahkan, memunculkan kecenderungan nostalgia untuk kembali kepada praktik-praktik yang tidak demokratis. Demokrasi pun dihujat sebagai tidak sesuai dengan Pancasila, bertentangan dengan budaya bangsa, dan sebagainya. Namun mencampakkan demokrasi oleh karena kekurangan-kekurangannya bukanlah jawaban yang tepat. Defisit demokrasi tidak bisa dipisahkan dengan "mengurangi" demokrasi misalnya dengan memberangus kebebasan; tapi justru dengan upaya-upaya untuk "semakin" demokratis dalam arti kinerja institusi yang lebih baik dan *citizenship* yang lebih matang.

1.2 Urgensi Indeks Demokrasi di Indonesia

Dalam dua dasawarsa terakhir, pengukuran demokrasi menjadi topik hangat di kalangan akademik serta pemerhati dan praktisi pembangunan. Gelombang demokratisasi global telah menjadikan separuh penduduk dunia kini hidup dalam sistem demokrasi, dengan berbagai variasi pada tataran praktiknya. Oleh karena itu muncul kebutuhan untuk mengetahui sejauh mana demokratisasi telah berjalan serta melakukan perbandingan antar-negara.

Indonesia, yang menjalani transisi demokrasi besar-besaran, sering disebut sebagai *big bang transition*; juga merasakan kebutuhan ini. Bahkan, dengan variasi antar-daerah yang sangat lebar, kebutuhan ini menjadi sangat terasa. Indonesia perlu mengetahui tingkat perkembangan demokrasi di tingkat daerah karena keberhasilannya sebagai negara demokratik akan sangat tergantung pada sejauh mana demokrasi berkembang dan diterapkan di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan demokrasi di daerah yang begitu beragam memerlukan data empirik yang dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. IDI dibangun untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di atas, khususnya memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di tingkat Provinsi.

1.2.1 Apa Itu IDI?

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang *country specific*, yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan

konsep demokrasi maupun metode pengukurannya IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia.

Empat prinsip dasar penyusunan IDI antara lain:

1. IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi.
2. IDI hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi.
3. IDI mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat.
4. IDI bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan tujuan antara untuk merealisasikan kehidupan masyarakat yang bebas, aman, adil dan sejahtera.

1.2.2 Mengapa IDI Diperlukan?

Setelah berakhirnya Orde Baru yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998, terbuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi penyelenggaraan negara. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya, karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lain yang lebih tepat untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter. Oleh karena itu, menjadi konsensus nasional bahwa demokrasi perlu ditegakkan setelah Orde Baru tumbang.

Sekarang, setelah dua puluh tiga tahun berjalan sejak Reformasi, muncul pertanyaan sejauhmana sesungguhnya perkembangan demokrasi ini, khususnya pada tingkat provinsi. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif. Keberadaan pengukuran seperti ini juga diharapkan memicu *diskursus* di antara pemangku kepentingan, mendorong kompetisi yang sehat

dan berbagi (*sharing*) pengalaman di antara pemerintah daerah, serta menyediakan data yang sangat dibutuhkan terkait dengan ranah pembangunan demokrasi yang perlu mendapat perhatian.

IDI dibuat dengan provinsi sebagai unit analisa. Dengan kata lain, IDI adalah suatu alat ukur yang dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya bagaimana kondisi atau status perkembangan demokrasi politik pada tingkat provinsi di Indonesia. Dengan demikian, IDI merupakan potret demokrasi pada tingkat provinsi.

IDI diharapkan memiliki sejumlah manfaat. Pertama, secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mereka yang mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, seperti para mahasiswa, ilmuwan, dan wartawan. Keberadaan IDI merupakan kemajuan dalam studi perkembangan demokrasi di Indonesia karena untuk pertama kalinya perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia dapat diketahui dengan pasti.

Kedua, bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi. Data yang ditunjukkan IDI mampu menggambarkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan data IDI sebagai rujukan dalam proses deliberasi perumusan kebijakan dan program pembangunan politik atau proses demokrasi berdasarkan bukti-bukti empiris.

1.3 Konsep dan Metodologi Indeks Demokrasi Indonesia

Demokrasi adalah konsep multi dimensional yang kompleks. Pengukuran demokrasi, kendati tak bisa menghindarkan diri dari penyederhanaan, tetap harus mempertimbangkan kompleksitas tersebut. Oleh karena itu, kejelasan konseptualisasi dalam menyusun IDI menjadi sangat penting. Selain itu, perlu penjelasan kontekstualisasinya dalam praktik-praktik demokrasi yang berlangsung di suatu tempat dan kurun waktu tertentu. Dengan demikian indikator-indikator yang digunakan menjadi sensitif terhadap realita demokrasi yang diukur. Bagian ini akan menyajikan konseptualisasi dan kontekstualisasi demokrasi dalam rangka membangun Indeks Demokrasi Indonesia.

1.3.1 Kerangka Konseptual IDI

Secara sederhana, definisi demokrasi adalah sistem pemerintahan yang ditandai antara lain oleh adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam menyusun IDI disepakati tiga aspek yang dijadikan objek kajian. Tiga aspek yang dimaksud adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak Politik (*Political Rights*), dan Kelembagaan Demokrasi (*Institutions of Democracy*).

Aspek pertama dan kedua merefleksikan esensi konsep demokrasi. Namun demikian, mengingat dua esensi dasar dari demokrasi tersebut tidak mungkin akan dapat bekerja secara maksimal tanpa adanya “wadah”, struktur, dan prosedur pendukung, maka Kelembagaan Demokrasi juga dianggap sebagai aspek penting demokrasi. Atas dasar pertimbangan inilah, dalam penyusunan IDI kelembagaan demokrasi didudukkan sebagai aspek ketiga.

1.3.1.1 Aspek Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)

Secara sederhana, kebebasan sipil dapat didefinisikan sebagai kebebasan individu/warga negara dan kelompok individu untuk berkumpul dan berserikat, berpendapat, berkeyakinan, serta kebebasan dari diskriminasi dan pengekangan yang berasal dari individu/warga negara lainnya, kekuasaan negara, dan kelompok masyarakat tertentu. Namun demikian, dalam konteks IDI, kebebasan sipil yang akan dilihat dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu.

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan IDI, aspek Kebebasan Sipil tersebut telah diturunkan ke dalam sejumlah variabel sebagai berikut:

- 1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, (variabel ke - 1)
- 2) Kebebasan Berpendapat, (variabel ke - 2)
- 3) Kebebasan Berkeyakinan, (variabel ke - 3)
- 4) Kebebasan dari Diskriminasi, (variabel ke - 4).

Sementara pada tingkat indikator, terdapat 10 (sepuluh) indikator dalam aspek Kebebasan Sipil ini, yang terdiri dari dua indikator pada variabel pertama dan kedua, serta masing-masing tiga indikator pada variabel ketiga dan keempat (lihat tabel 1.1).

Tabel 1.1
Komponen penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Aspek Kebebasan Sipil

Variabel I : Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Indikator 1

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Indikator 2

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Variabel II : Kebebasan Berpendapat

Indikator 3

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat.

Indikator 4

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

Variabel III : Kebebasan Berkeyakinan

Indikator 5

Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan ibadah agama.

Indikator 6

Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ibadah agama.

Indikator 7

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama.

Variabel IV: Kebebasan dari Diskriminasi

Indikator 8

Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Indikator 9

Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Indikator 10

Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

1.3.1.2 Aspek Hak-Hak Politik (*Political Rights*)

Hak-hak Politik merupakan indikator demokrasi politik yang cukup lengkap, mencakup partisipasi dan kompetisi. Dalam konteks IDI, Hak-Hak Politik diturunkan ke dalam dua variabel yakni:

- 1) Hak Memilih dan Dipilih, (variabel ke - 5)
- 2) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, (variabel ke - 6).

Sementara pada tingkat indikator, aspek Hak-Hak Politik memiliki tujuh indikator yang terdiri dari lima indikator pada variabel kelima, dan 2 indikator pada variabel keenam (lihat tabel. 1.2).

Tabel 1.2
Komponen Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia
Aspek Hak-Hak Politik

Variabel V : Hak Memilih dan Dipilih

Indikator 11

Hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat.

Indikator 12

Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak memilih.

Indikator 13

Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Indikator 14

Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*).

Indikator 15

Persentase perempuan terpilih terhadap total Anggota DPRD Provinsi.

Variabel VI : Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Indikator 16

Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan.

Indikator 17

Kritik/masukan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan.

1.3.1.3 Aspek Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)

Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik sebagai pilar dari konsep demokrasi tidak mungkin dapat teraktualisasi secara maksimal tanpa didukung oleh lembaga demokrasi. Atas dasar pertimbangan ini, cukup beralasan bila beberapa akademisi telah mengartikulasi lembaga demokrasi sebagai aspek yang tidak terpisahkan dari kebebasan sipil dan hak-hak politik.

Mengingat begitu krusialnya peran dari lembaga demokrasi tersebut, maka bagi mereka yang berafiliasi dengan perspektif ini acapkali mengatakan bahwa satu di antara yang membedakan antara demokrasi dan anarki adalah karena kebebasan sipil dalam praktik demokrasi dilakukan secara institusional, atau dengan kata lain didasarkan pada aturan, norma, prosedur dan kelembagaan yang telah disepakati secara bersama.

Pada konteks ilmu politik, institusi telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara. Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi, maka institusi yang dimaksud adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis.

Dengan merujuk sejumlah elemen dari institusi demokrasi, untuk tujuan pengukuran IDI, aspek Lembaga Demokrasi pun telah dioperasionalkan ke dalam sejumlah variabel berikut:

- 1) Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil, (variabel ke - 7)
- 2) Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), (variabel ke - 8)
- 3) Peran Partai Politik, (variabel ke - 9)

- 4) Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, (variabel ke - 10)
- 5) Peran Peradilan yang Independen, (variabel ke - 11).

Pada tingkat indikator, aspek Lembaga Demokrasi diturunkan ke dalam sebelas indikator, dengan rincian dua indikator pada variabel ketujuh, kesembilan, sepuluh, dan sebelas, serta tiga indikator pada variabel kedelapan (lihat tabel. 1.3)

Dengan demikian, secara keseluruhan, komponen yang membentuk IDI 2020 terdiri dari 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator.

Tabel 1.3
Komponen Penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
Aspek Lembaga Demokrasi

Variabel VII : Pemilu yang Bebas dan Adil

Indikator 18

Netralitas penyelenggara pemilu.

Indikator 19

Kecurangan dalam penghitungan suara.

Variabel VIII : Peran DPRD

Indikator 20

Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan.

Variabel IX : Peran Partai Politik

Indikator 23

Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu.

Indikator 24

Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi.

Variabel X: Peran Birokrasi Pemerintah Daerah

Indikator 25

Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh Keputusan PTUN.

Indikator 26

Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah daerah.

Variabel XI: Peran Peradilan yang Independen

Indikator 27

Keputusan hakim yang kontroversial.

Indikator 28

Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

1.3.2 Metodologi IDI

Pada tingkat yang paling kongkrit, IDI melalui indikator-indikator dari ketiga aspek penting demokrasi, menilai apakah ada aturan, situasi atau kejadian yang mencerminkan ada atau tidak adanya, berkembang atau terhambatnya demokrasi di suatu provinsi. Kondisi demokrasi di suatu daerah dapat dimanifestasikan dalam berbagai indikator, seperti aturan-aturan yang ada, perilaku masyarakat, dan sebagainya.

Selanjutnya berbagai indikasi keadaan demokrasi ini dapat ditangkap melalui berbagai medium seperti dokumen-dokumen resmi, laporan di media masa (cetak maupun elektronik), serta dalam opini masyarakat yang hidup di tempat itu. Dengan demikian ada berbagai data yang mungkin digunakan untuk menangkap kondisi demokrasi, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif.

Menjawab tantangan metodologi di atas, IDI menggunakan metode Triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi silang (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Sehubungan dengan itu, ada empat metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu: *review media*/telaah media (analisis isi berita surat kabar), *review document* (analisis isi dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah), *Focused Group Discussion* (FGD) atau diskusi terarah terbatas, dan *indepth interview* (wawancara mendalam).

1.3.2.1 Review Media dan Dokumen

Review media dan dokumen dipilih sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena baik media maupun dokumen dianggap sebagai sumber informasi paling realistis untuk mendapatkan data kuantitatif (dalam kurun waktu pengamatan satu tahun) berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI.

Surat kabar atau koran diyakini sebagai sumber informasi yang paling relevan dalam merekam kehidupan daerah, termasuk didalamnya denyut demokrasi atau proses demokratisasi, selama satu tahun secara terus menerus dari hari ke hari.

Dalam konteks penyusunan IDI, persyaratan yang pertama merujuk pada aspek, variabel, dan indikator IDI. Sedangkan untuk memenuhi syarat yang kedua, ditetapkan media yang dimaksud adalah surat kabar terkemuka di Provinsi Riau. Sementara untuk jenis dokumen, yang digunakan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan DPRD seperti :

peraturan daerah (Perda), surat keputusan gubernur, surat keputusan DPRD serta dokumen-dokumen resmi lainnya seperti data demonstrasi dari Kepolisian dan data pemilih dari KPU.

1.3.2.2 Focused Group Discussion (FGD)

Secara umum, tujuan utama dari penggunaan FGD adalah untuk menjangkau data kualitatif berkaitan dengan aspek, variabel dan indikator IDI. Secara khusus, tujuan FGD dalam pengumpulan data IDI adalah **pertama**, untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan (verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data kuantitatif berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah berhasil dikumpulkan melalui *review* media dan dokumen.

Kedua, melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi terhadap indikator IDI. **Ketiga**, menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui *review* media dan *review* dokumen.

1.3.2.3 Indepth Interview

Pada konteks penyusunan IDI, wawancara mendalam (*indepth interview*) digunakan untuk melakukan verifikasi dan pendalaman informasi yang telah diperoleh melalui *review* media dan dokumen serta FGD. Karena itu, *indepth interview* bukan merupakan metode utama dalam proses pengumpulan data melainkan sebagai komplementer karena melengkapi ketiga metode lainnya.

Dengan peran seperti ini, *indepth interview* baru dilakukan setelah FGD berlangsung guna mendalami berbagai informasi terkait kasus-kasus yang belum terungkap secara maksimal dalam FGD. Kendati *indepth interview* bersifat komplementer terhadap metode pengumpulan data lainnya, namun memiliki peran yang tidak kalah penting karena berperan sebagai “pos” terakhir dalam pengumpulan data kualitatif.

Keterkaitan empat metode di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: dua metode pertama (*review* media dan dokumen) berperan sebagai basis utama dalam pengumpulan data kuantitatif berkaitan dengan aspek, variabel, dan indikator IDI. Selanjutnya, data kuantitatif melalui *review* media dan dokumen diverifikasi dan dielaborasi dengan data kualitatif yang dikumpulkan melalui dua metode berikutnya (FGD dan *indepth interview*).

1.3.3 Skala Kinerja Demokrasi

Untuk menggambarkan capaian kinerja demokrasi di Provinsi Riau, digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Kinerja terendah (nilai indeks = 0) secara teoritik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, kinerja tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi (skor 5).

Selanjutnya untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks antar provinsi yang dihasilkan, skala 0 – 100 di atas dibagi ke dalam tiga kategori kinerja demokrasi, yaitu “**baik**” (indeks > 80), “**sedang**” (indeks 60 – 80) dan “**buruk**” (indeks < 60).

PROFIL

IDI RIAU



<https://riau.go.id>

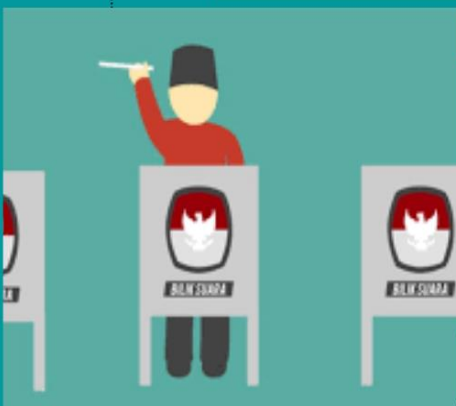
PROFIL DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI RIAU 2020

IDI PROVINSI RIAU 2020 : 76,86



Aspek kebebasan sipil

86,08



Aspek hak-hak politik

65,40



Aspek lembaga demokrasi

83,46

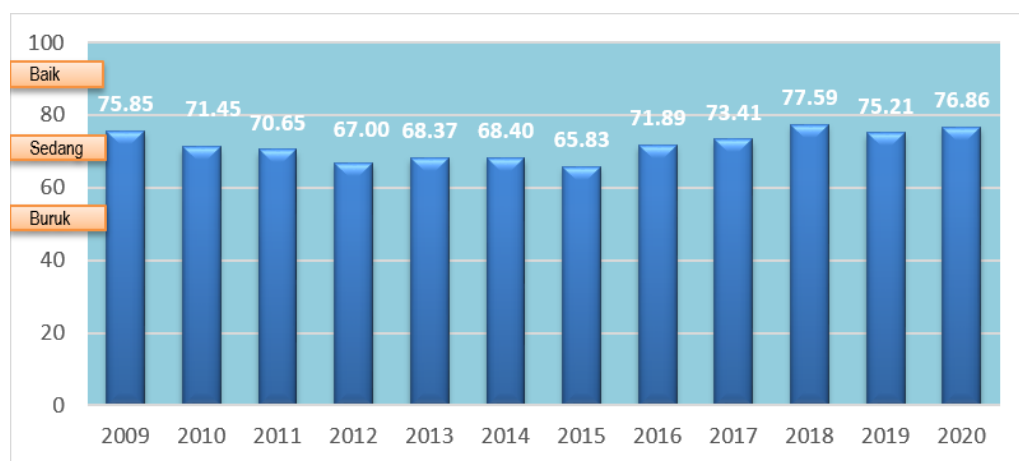
2 PROFIL IDI RIAU TAHUN 2020

Bab ini menguraikan hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau Tahun 2020. Secara berturut-turut akan disampaikan hasil Indeks Provinsi yang merupakan rata-rata capaian Indeks Aspek Kebebasan Sipil, Indeks Aspek Hak-hak Politik dan Indeks Aspek Lembaga Demokrasi.

2.1 Dinamika IDI Provinsi Riau Tahun 2020

Pada tahun 2020, nilai capaian Indeks Demokrasi Provinsi Riau adalah 76,86. Nilai ini merupakan sumbangan dari ketiga aspek yang diukur yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Dalam skala pengukuran IDI yang berkisar dari 0 sampai dengan 100, nilai indeks Provinsi Riau di atas menunjukkan bahwa kualitas kinerja demokrasi di Provinsi Riau masih tergolong “sedang”. Untuk membandingkan capaian indeks demokrasi Provinsi Riau Tahun 2009-2020, dapat dilihat pada Grafik 2.1

Grafik 2.1
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Riau, 2009-2020



Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau tahun 2020 mencapai 76,86 (dalam skala indeks 0 sampai 100). Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI 2019 yang capaiannya sebesar 75,21. Meskipun mengalami kenaikan, capaian kinerja IDI Provinsi Riau masih dalam kategori “sedang”.

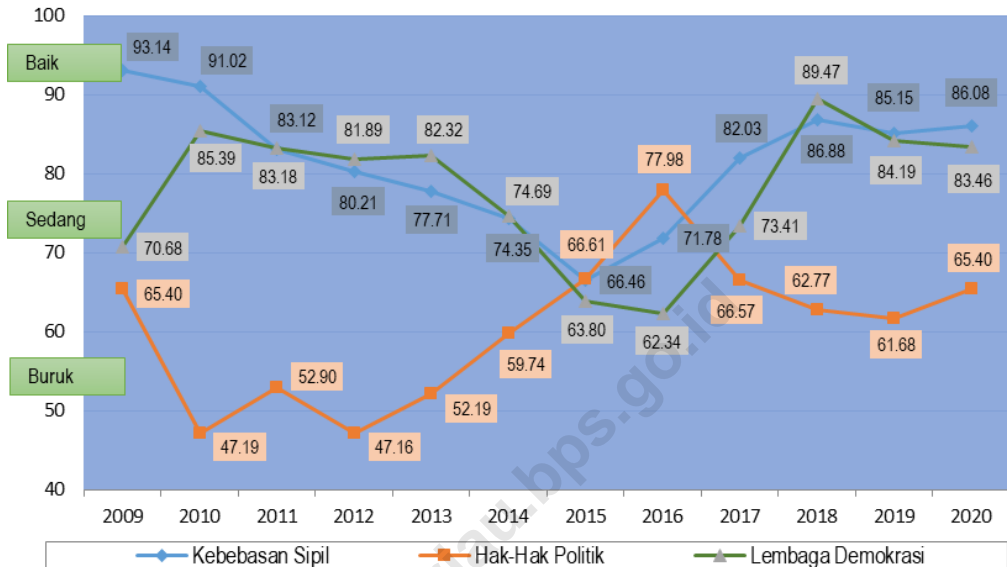
Perkembangan IDI Provinsi Riau sejak tahun 2009 hingga 2020, menunjukkan bahwa tingkat demokrasi di Provinsi Riau mengalami dinamika. Pada periode tahun 2009-2011, IDI berfluktuasi di kisaran angka 70-an, selanjutnya pada periode tahun 2012-2015 di kisaran angka 60-an, kemudian pada periode tahun 2016-2020 kembali di kisaran 70-an. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60). Hal ini menunjukkan bahwa walaupun IDI Provinsi Riau tahun 2020 masih pada kategori “sedang” namun telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan lima tahun lalu.

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Provinsi Riau. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Grafik 2.2 menunjukkan sebaran dan perbandingan nilai capaian Aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi tahun 2009-2020. Dinamika tingkat demokrasi di Provinsi Riau juga tercermin dari ketiga aspek pembentuk IDI. Sejak tahun 2009 hingga 2020, Aspek Hak-hak Politik memiliki tren yang berbeda dibandingkan dua aspek lainnya.

Grafik 2.2

Sebaran Nilai Capaian Aspek IDI Provinsi Riau, 2009-2020



Aspek Kebebasan Sipil mengalami fluktuasi hampir sama seperti dua aspek lainnya. Aspek Kebebasan Sipil berada pada kategori "baik" pada periode tahun 2009-2012 dan tahun 2017-2020. Namun pada periode 2013-2016, Aspek Kebebasan Sipil sempat berubah menjadi kategori "sedang", serta mengalami titik terendah pada tahun 2015 sebesar 66,46. Tahun 2020, aspek Kebebasan Sipil meningkat menjadi 86,08.

Aspek Hak-hak Politik pada tahun 2009 berada pada kategori "sedang", namun pada periode tahun 2010-2014 berubah menjadi kategori "buruk". Pada periode 2015-2020, aspek Hak-hak Politik kembali berada pada kategori "sedang". Sejak tahun 2017-2019, nilai Aspek Hak-hak Politik menunjukkan

tren menurun hingga mencapai 61,68 di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 65,40.

Aspek Lembaga Demokrasi pada periode 2010-2013 dan 2018-2020 berada pada kategori "baik", setelah pada periode tahun sebelumnya berada pada kategori "sedang". Nilai capaian terendah aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2016 yaitu sebesar 62,34 dan tertinggi pada tahun 2018 yaitu 89,47. Pada tahun 2020 turun menjadi 83,46.

IDI Provinsi Riau 2020 sebesar 76,86 naik (1,65 poin) dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 75,21. Perubahan angka IDI Provinsi Riau pada periode 2019-2020 dipengaruhi oleh peningkatan Aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,93 poin (dari 85,15 menjadi 86,08) dan Aspek Hak-hak Politik sebesar 3,72 poin (dari 61,68 menjadi 65,40) serta penurunan Aspek Lembaga Demokrasi sebesar 0,73 poin (dari 84,19 menjadi 83,46). Meskipun nilai IDI Provinsi Riau tahun 2020 sudah mengalami peningkatan, namun tingkat demokrasi Provinsi Riau tetap berada dalam kategori "sedang".

2.2 Indeks Aspek Kebebasan Sipil

Ancaman bagi kebebasan sipil umumnya berasal dari dua sumber utama. Pertama, ancaman yang bersumber dari para pemegang otoritas negara. Pemerintah pada umumnya kurang menyukai adanya kebebasan sipil, terutama dalam hal mengemukakan pendapat dan berserikat, karena akan mengganggu hegemoni politik yang dimiliki. Ancaman yang kedua bisa saja tidak berasal dari negara, dan atau pemerintah, tetapi berasal dari sesama masyarakat sipil.

Pada konteks IDI, kebebasan sipil dibatasi hanya pada kebebasan individu dan kelompok yang berkaitan erat dengan kekuasaan negara dan atau kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya untuk mendapatkan data dan informasi guna penyusunan IDI, maka aspek "Kebebasan Sipil" tersebut telah diturunkan ke dalam 4 (empat) variabel utama yaitu:

1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat
2. Kebebasan Berpendapat
3. Kebebasan Berkeyakinan, dan
4. Kebebasan dari Diskriminasi

Aspek Kebebasan Sipil dalam penghitungan IDI dibatasi hanya mengukur kebebasan individu dan kelompok tertentu dalam kaitannya dengan kekuasaan negara dan atau kelompok. Dengan kata lain, IDI tidak mengukur tingkat kebebasan individu atau warga negara dari individu atau warga negara lainnya.

Nilai indeks Aspek Kebebasan Sipil 2020 Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 0,93 poin, dari 85,15 pada tahun 2019 menjadi 86,08 pada tahun 2020, dan masih tetap berada pada kategori "baik".

Aspek Kebebasan Sipil Tahun 2020 dibentuk dari komposit nilai indeks empat variabel yaitu: variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat (97,66), Kebebasan Berpendapat (55,53), Kebebasan Berkeyakinan (90,77), dan Kebebasan dari Diskriminasi (82,47). Jika dibandingkan tahun 2019, peningkatan nilai terjadi pada variabel Kebebasan berkeyakinan, sedangkan variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, variabel Kebebasan Berpendapat dan Kebebasan dari Diskriminasi mengalami penurunan.

Dari sepuluh indikator pembentuk Aspek Kebebasan Sipil, hanya tiga indikator yang mengalami penurunan yakni indikator ancaman kekerasan atau pengguna kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat (turun 18,75 poin), indikator ancaman kekerasan atau pengguna kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (turun 50,00 poin), dan indikator ancaman kekerasan atau pengguna kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya (turun 33,33 poin).

Tabel 2.1 menggambarkan sebaran dari keempat nilai variabel pada Aspek Kebebasan Sipil 2020 dibandingkan tahun 2019. Capaian nilai indeks Aspek Kebebasan Sipil di Provinsi Riau tahun 2020 naik sebesar 0,93 poin. Kenaikan nilai indeks tersebut disumbangkan oleh variabel Kebebasan Berkeyakinan yang mengalami peningkatan sebesar 7,22 poin. Sementara itu, penurunan terjadi pada tiga variabel lain yakni: Kebebasan Berkumpul dan Berserikat (turun 2,34 poin), Kebebasan Berpendapat (turun 4,88 poin), dan Kebebasan dari Diskriminasi (turun 11,00 poin). Walaupun hanya satu variabel yang mengalami kenaikan namun kenaikan tersebut mampu mendongkrak secara signifikan nilai Aspek Kebebasan Sipil.

Tabel 2.1
Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Kebebasan Sipil

| NO | VARIABEL | 2019 | 2020 |
|------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | Kebebasan Berkumpul dan Berserikat | 100,00 | 97,66 |
| 2 | Kebebasan Berpendapat | 60,41 | 55,53 |
| 3 | Kebebasan Berkeyakinan | 83,55 | 90,77 |
| 4 | Kebebasan dari Diskriminasi | 93,47 | 82,47 |
| Aspek Kebebasan Sipil | | 85,15 | 86,08 |

Penjelasan berikut akan menguraikan secara lebih rinci perolehan nilai indeks setiap variabel.

2.2.1 Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

Nilai indeks variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,34 poin dari 100,00 pada tahun 2019 menjadi 97,66 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan nilai salah satu indikator pembentuk variabel tersebut mengalami penurunan. Indikator tersebut adalah ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Nilai indikator ini mengalami penurunan sebesar 18,75 poin dari 100,00 pada tahun 2019 menjadi 81,25 pada tahun 2020.

Tabel 2.2
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat

| NO | INDIKATOR | 2019 | 2020 |
|--|---|---------------|--------------|
| 1 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat | 100,00 | 81,25 |
| Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat | | 100,00 | 97,66 |

Tabel 2.2 memperlihatkan nilai indeks variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat di Provinsi Riau sebesar 97,66 pada tahun 2020. Nilai variabel ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2019 dengan nilai sebesar 100,00. Penurunan variabel ini dipengaruhi oleh nilai indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat yang mengalami penurunan sebesar 18,75 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat tidak mengalami perubahan, masih tetap pada nilai 100,00.

Nilai Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat pada tahun 2020 sebesar 97,66. Hal ini mengindikasikan bahwa hak kebebasan warga untuk berkumpul dan berserikat mengalami hambatan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya selama tahun 2020.

2.2.2 Variabel Kebebasan Berpendapat

Nilai indeks Variabel Kebebasan Berpendapat di Provinsi Riau pada tahun 2020 adalah sebesar 55,53. Dibandingkan tahun 2019, nilai Variabel Kebebasan Berpendapat mengalami penurunan sebesar 4,88 poin. Penurunan variabel ini hingga menyebabkan kualitas kinerja variabel berubah dari kategori “sedang” pada tahun 2019 menjadi kategori “buruk” di tahun 2020.

Penurunan nilai variabel Kebebasan Berpendapat disebabkan nilai indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar 50,00 poin (dari 50,00 menjadi 00,00), jika dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan nilai indikator ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat mengalami kenaikan sebesar 4,17 poin. Nilai indikator tersebut pada tahun 2019 sebesar 62,50 menjadi 66,67 pada tahun 2020.

Meskipun nilai salah satu indikator pembentuk variabel Kebebasan Berpendapat mengalami kenaikan, namun belum mampu meningkatkan nilai variabel ini secara signifikan. Sementara nilai indikator lainnya yang mengalami penurunan justru sangat berpengaruh pada nilai variabel, hal ini menyebabkan variabel kebebasan berpendapat mengalami penurunan pada tahun 2020 seperti dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan Berpendapat

| NO | INDIKATOR | 2019 | 2020 |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 3 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat | 62,50 | 66,67 |
| 4 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat | 50,00 | 00,00 |
| Variabel Kebebasan Berpendapat | | 60,41 | 55,53 |

Penurunan nilai variabel Kebebasan Berpendapat pada tahun 2020 mengindikasikan bahwa masih adanya hambatan kepada masyarakat dalam hal berpendapat yang dilakukan oleh masyarakat lainnya.

2.2.3 Variabel Kebebasan Berkeyakinan

Nilai indeks variabel Kebebasan Berkeyakinan di Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 7,22 poin, dari 83,55 pada tahun 2019 menjadi 90,77 pada tahun 2020. Variabel ini dibentuk oleh tiga indikator. Pada Tabel 2.4, dapat dilihat salah satu dari indikator tidak mengalami perubahan, sedangkan dua indikator lainnya mengalami kenaikan.

Indikator aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya mengalami kenaikan sebesar 8,70 poin, menjadi 86,96 pada 2020 dan Indikator tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ibadah agama mengalami kenaikan sebesar 9,37 poin, menjadi 100,00 pada 2020. Hal ini

mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah mulai bersikap dan berperilaku demokratis dalam urusan keagamaan dan berkeyakinan.

Tabel 2.4
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan Berkeyakinan

| NO | INDIKATOR | 2019 | 2020 |
|--|---|--------------|--------------|
| 5 | Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan ibadah agama | 78,26 | 86,96 |
| 6 | Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ibadah agama | 90,63 | 100,00 |
| 7 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama | 100,00 | 100,00 |
| Variabel Kebebasan Berkeyakinan | | 83,55 | 90,77 |

2.2.4 Variabel Kebebasan dari Diskriminasi

Nilai indeks Variabel Kebebasan dari Diskriminasi di Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 11,00 poin, dari 82,47 tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 93,47 (lihat Tabel 2.5). Hal ini disebabkan oleh salah satu indikator ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, atau terhadap kelompok rentan lainnya mengalami penurunan sebesar 33,33 poin dari 100,00 tahun 2019 menjadi 66,67 tahun 2020.

Penurunan nilai variabel Kebebasan dari Diskriminasi di Provinsi Riau tahun 2020 adalah menunjukkan bahwa masih terdapat ancaman kekerasan

atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya.

Tabel 2.5
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Kebebasan dari Diskriminasi

| NO | INDIKATOR | 2019 | 2020 |
|---|---|--------------|--------------|
| 8 | Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 83,33 | 83,33 |
| 9 | Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya | 100,00 | 66,67 |
| Variabel Kebebasan dari Diskriminasi | | 93,47 | 82,47 |

2.3 Indeks Aspek Hak-Hak Politik

Pada konteks penyusunan IDI, aspek Hak-hak Politik diturunkan ke dalam 2 (dua) variabel utama, yang meliputi :

1. Hak Memilih dan Dipilih
2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Indeks Aspek Hak-hak Politik di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar 65,40 meningkat (3,72 poin) dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 61,68. Perubahan nilai Aspek Hak-hak Politik pada periode 2019-2020 dipengaruhi oleh peningkatan nilai variabel Hak Memilih dan Dipilih sebesar 0,91 poin (dari

70,65 menjadi 71,56) dan kenaikan nilai variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan sebesar 6,52 poin (dari 52,72 menjadi 59,24) (lihat Tabel 2.6).

Capaian nilai Aspek Hak-hak Politik tahun 2020 mengalami peningkatan, namun kualitas kerjanya masih tetap berada pada kategori “sedang”. Nilai Aspek Hak-hak Politik sebesar 65,40 menggambarkan kualitas pemenuhan hak-hak politik di Riau masih perlu perhatian. Nilai indeks Aspek Hak-Hak Politik di Provinsi Riau tahun 2020 merupakan nilai yang paling rendah dibandingkan dua aspek IDI lainnya. Artinya perlu perhatian pemerintah dalam menjalankan pengawasan dalam memenuhi hak-hak politik masyarakat Riau.

Tabel 2.6

Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Hak-Hak Politik

| NO | VARIABEL | 2019 | 2020 |
|------------------------------|---|--------------|--------------|
| 5 | Hak Memilih dan Dipilih | 70,65 | 71,56 |
| 6 | Partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan Pemerintahan | 52,72 | 59,24 |
| Aspek Hak-Hak Politik | | 61,68 | 65,40 |

2.3.1 Variabel Hak Memilih dan Dipilih

Nilai indeks variabel “Hak Memilih dan Dipilih” di Provinsi Riau pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,91 poin, dari 70,65 pada tahun 2019 menjadi 71,56 pada tahun 2020. Kenaikan nilai variabel ini dipengaruhi oleh indikator persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi. Sementara 4 indikator lain tidak mengalami perubahan karena data

yang digunakan diperoleh pada tahun penyelenggaraan Pemilu legislative diantaranya indikator hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat, indikator ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak memilih, indikator kualitas daftar pemilih tetap (DPT) dan indikator penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (lihat tabel 2.7).

Tabel 2.7
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Hak Memilih dan Dipilih

| NO | INDIKATOR | 2019 | 2020 |
|---|---|--------------|--------------|
| 11 | Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat | 84,62 | 84,62 |
| 12 | Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih | 96,47 | 96,47 |
| 13 | Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) | 59,15 | 59,15 |
| 14 | Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (<i>voters turnout</i>) | 84,40 | 84,40 |
| 15 | Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi | 61,53 | 71,03 |
| Variabel Hak Memilih dan Dipilih | | 70,65 | 71,56 |

Empat dari lima indikator dalam variabel Hak Memilih dan Dipilih yaitu indikator pertama sampai dengan indikator keempat terkait dengan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif karena data yang digunakan diperoleh pada tahun penyelenggaraan Pemilu legislatif. Seperti tahun 2014, dan 2019 dan data dari

empat indikator tersebut dikumpulkan/diperoleh lagi pada tahun 2024 (perkembangannya lihat Grafik 2.3).

Perkembangan kelima indikator pembentuk variabel Hak memilih dan Dipilih adalah sebagai berikut:

Indikator pertama adalah hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat dengan nilai 84,62 pada tahun 2019, menurun 12,82 poin dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 97,44. Hal ini disebabkan karena semakin banyaknya kejadian yang menghambat hak memilih atau dipilih masyarakat selama pemilu 2019.

Indikator kedua adalah ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak memilih dengan nilai 96,47 pada tahun 2019, meningkat 36,47 poin dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 60,00. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Provinsi Riau semakin memfasilitasi kelompok penyandang disabilitas agar mereka dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019.

Indikator ketiga adalah kualitas daftar pemilih tetap (DPT) dengan nilai 59,15 pada tahun 2019, menurun 9,67 poin dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 68,82. Hal ini disebabkan karena menurunnya kualitas DPT di Provinsi Riau berada pada Pemilu 2019. Penurunan nilai indikator ini menyebabkan kinerja indikator ini berubah dari kategori "sedang" menjadi kategori "buruk". Penurunan kualitas DPT dapat mengakibatkan penyelenggaraan Pemilu menjadi kurang maksimal.

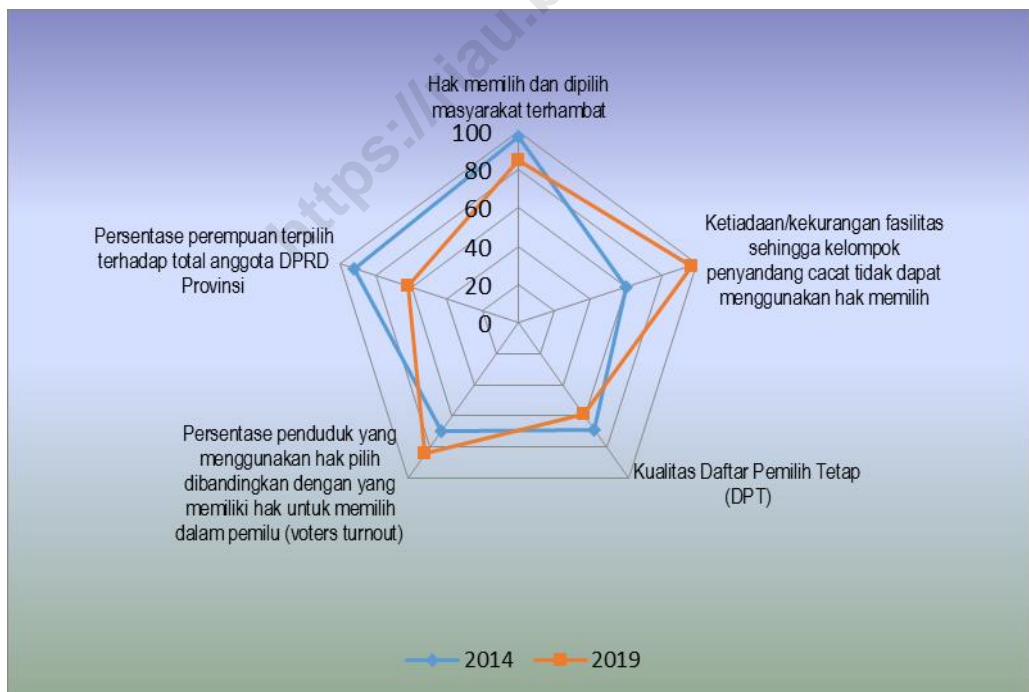
Indikator keempat adalah Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*) dengan nilai 84,40 pada tahun 2019, meningkat 14,92 poin dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 69,48. Hal ini disebabkan karena

kesadaran masyarakat Riau untuk menggunakan hak pilihnya sudah semakin meningkat/membaik.

Sedangkan Indikator kelima, yakni Persentase Perempuan Terpilih terhadap Total Anggota DPRD Provinsi dengan nilai 71,03 pada tahun 2020, mengalami kenaikan 9,50 poin dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 61,53. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi Riau pada tahun 2020.

Grafik 2.3

Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel “Hak Memilih dan Dipilih” yang Terkait Pemilihan Umum, Tahun 2014 dan 2019



2.3.2 Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan

Nilai indeks variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan pada tahun 2020 yaitu sebesar 59,24, mengalami kenaikan sebesar 6,52 poin dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 52,72 (lihat Tabel 2.8). Nilai variabel tersebut dipengaruhi oleh kenaikan nilai salah satu indikator yang terdapat didalamnya, sedangkan indikator lainnya tidak mengalami perubahan nilai.

Dari Tabel 2.8 terlihat bahwa penyebab kenaikan nilai indeks variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan adalah kenaikan nilai indikator demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan sebesar 13,05 poin, (dari 5,43 menjadi 18,48). Hal ini mengindikasikan semakin berkurangnya kejadian demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan atau mengarah pada tindak kekerasan di Provinsi Riau dalam partisipasi politik selama tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun nilai variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan mengalami peningkatan, namun capaian kinerja variabel ini masih berada pada kategori "buruk" sehingga perlu perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat meningkat di tahun mendatang.

Tabel 2.8**Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan**

| NO | INDIKATOR | 2019 | 2020 |
|---|---|--------------|--------------|
| 16 | Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan | 5,43 | 18,48 |
| 17 | Kritik/masukan pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan | 100,00 | 100,00 |
| Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan | | 52,72 | 59,24 |

2.4 Indeks Aspek Lembaga Demokrasi

Kebebasan Sipil dan Hak-hak Politik sebagai pilar dari konsep demokrasi tidak mungkin dapat teraktualisasi secara maksimal tanpa didukung oleh Lembaga-lembaga Demokrasi. Mengingat begitu krusialnya peran dari lembaga demokrasi tersebut, maka bagi mereka yang berafiliasi dengan perspektif ini, acapkali mengatakan bahwa satu di antara yang membedakan antara demokrasi dan anarki adalah karena kebebasan sipil dalam praktik demokrasi dilakukan secara institusional, atau dengan kata lain didasarkan pada aturan, norma, prosedur dan kelembagaan yang telah disepakati secara bersama.

Kendati kata lembaga atau "institusi" itu sendiri sering memiliki arti yang relatif berbeda antara disiplin ilmu satu dengan yang lainnya, namun pada konteks ilmu politik, institusi telah didefinisikan sebagai lembaga publik yang dibentuk dan difungsikan untuk mengatur dan melaksanakan aktivitas negara, dan atau pemerintah. Bila definisi ini dikaitkan dengan konsep demokrasi,

maka institusi yang dimaksud tidak lain adalah institusi-institusi negara yang dibentuk dan difungsikan untuk menopang terbentuk dan bekerjanya sistem politik yang demokratis. Ini berarti, dalam wujud lembaga, maka institusi demokrasi dapat berada pada tataran "suprastruktur". Meliputi antara lain, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun pada tataran "infrastruktur" seperti misalnya Pemilihan Umum (Pemilu), partai politik, media massa, dan kelompok kepentingan.

Dengan merujuk pada sejumlah elemen dari institusi demokrasi di atas, untuk tujuan pengukuran IDI, aspek lembaga demokrasi pun telah dioperasionalkan ke dalam 5 (lima) variabel utama, sebagai berikut :

1. Pemilihan Umum (Pemilu) yang Bebas dan Adil.
2. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
3. Peran Partai Politik, dan
4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dan
5. Peran Peradilan yang Independen

Indeks Aspek Lembaga Demokrasi tahun 2020 sebesar 83,46 menurun 0,73 poin dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 84,19. Meskipun nilai Aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan, namun kinerja Aspek Lembaga Demokrasi masih berada pada kategori "baik".

Perubahan nilai Indeks Aspek Lembaga Demokrasi pada periode 2019-2020 dipengaruhi oleh penurunan nilai variabel Peran DPRD sebesar 5,01 poin (dari 73,55 menjadi 68,54), dan variabel Peran Partai Politik sebesar 0,07 (dari 100,00 menjadi 99,93), sedangkan variabel Peran Birokrasi Pemerintah naik sebesar 1,20 (dari 67,53 menjadi 68,73). Sementara itu, yang tidak mengalami perubahan variabel Pemilu yang Bebas dan Adil sebesar 78,77,

dan variabel Peran Peradilan yang Independen masih sebesar 100,00 (lihat tabel 2.9).

Tabel 2.9
Nilai Indeks Masing-masing Variabel dalam Aspek Lembaga Demokrasi

| NO | VARIABEL | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 7 | Pemilu yang Bebas dan Adil | 78,77 | 78,77 |
| 8 | Peran DPRD | 73,55 | 68,54 |
| 9 | Peran Partai Politik | 100,00 | 99,93 |
| 10 | Peran Birokrasi Pemerintah | 67,53 | 68,73 |
| 11 | Peran Peradilan yang Independen | 100,00 | 100,00 |
| Aspek Lembaga Demokrasi | | 84,19 | 83,46 |

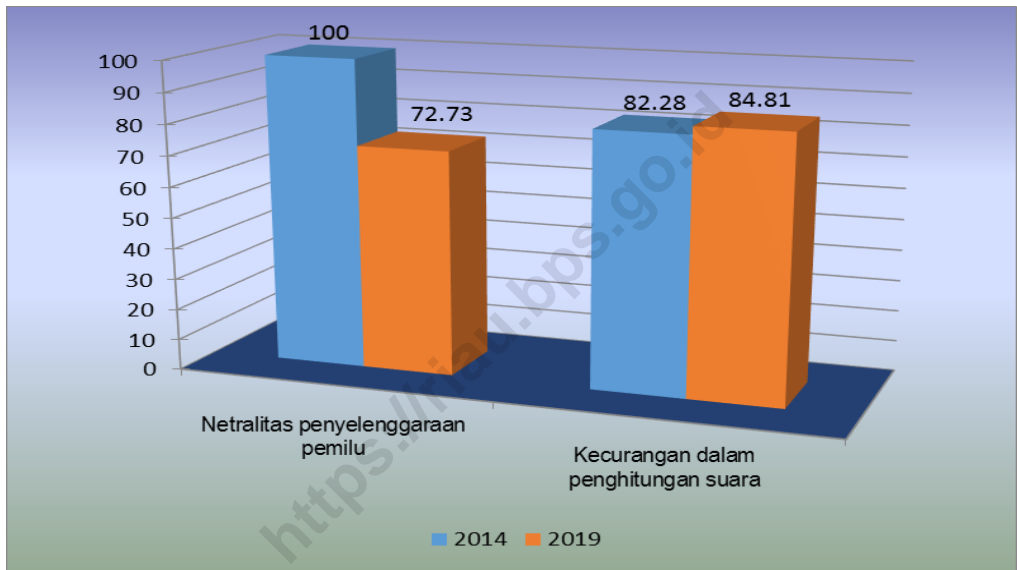
2.4.1 Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil

Nilai variabel Pemilu yang Bebas dan Adil di Provinsi Riau pada tahun 2020 mencapai 78,77. variabel ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019. Begitu juga dengan capaian kinerja variabel ini, masih berada pada kategori “sedang” (lihat tabel 2.10).

Angka variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dipengaruhi oleh 2 indikator pembentuknya yaitu: keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu dan kejadian atau pelaporan kecurangan dalam penghitungan suara. Data yang digunakan pada penghitungan variabel ini adalah dari Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif sehingga datanya hanya akan dihitung kembali pada tahun-tahun Pemilu saja. Sedangkan untuk tahun yang tidak ada penyelenggaraan Pemilu akan menggunakan data Pemilu yang terakhir. Perkembangan nilai

indikator-indikator pembentuk Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil tahun 2014 dan 2019 dapat dilihat pada Grafik 2.4.

Grafik 2.4
Perkembangan Nilai Indikator dari Variabel “Pemilu yang Bebas dan Adil” yang Terkait Pemilihan Umum, Tahun 2014 dan 2019



Tabel 2.10
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil

| NO | INDIKATOR | 2019 | 2020 |
|--|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 18 | Netralitas penyelenggara pemilu | 72,73 | 72,73 |
| 19 | Kecurangan dalam penghitungan suara | 84,81 | 84,81 |
| Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil | | 78,77 | 78,77 |

2.4.2 Variabel Peran DPRD

Indeks variabel Peran DPRD di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar 68,54 turun (5,01 poin) dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 73,55. Perubahan nilai variabel ini dipengaruhi oleh nilai indikator perda yang merupakan inisiatif DPRD yang turun cukup tajam sebesar 00,00 poin (dari 54,54 menjadi 00,00), sedangkan nilai indikator anggaran pendidikan dan kesehatan kembali naik sebesar 2,30 poin (dari 97,70 menjadi 100,00), dan indikator rekomendasi DPRD kepada Eksekutif naik sebesar 10,72 poin (dari 3,57 menjadi 14,29), kenaikan kedua indikator ini tidak dapat mendongkrak menaikkan variabel Peran DPRD hal ini disebabkan karena indikator perda yang merupakan inisiatif DPRD sangat berpengaruh dalam kinerja DPRD yaitu dapat melaksanakan fungsi legislasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tugas pokok mereka untuk mengajukan usul rancangan Undang-Undang atau membuat peraturan daerah (lihat tabel 2.11).

Tabel 2.11
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran DPRD

| NO | INDIKATOR | 2019 | 2020 |
|----------------------------|---|--------------|--------------|
| 20 | Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan | 97,70 | 100,00 |
| 21 | Perda yang merupakan Inisiatif DPRD | 54,54 | 00,00 |
| 22 | Rekomendasi DPRD kepada eksekutif | 3,57 | 14,29 |
| Variabel Peran DPRD | | 73,55 | 68,54 |

2.4.3 Variabel Peran Partai Politik

Nilai indeks variabel Peran Partai Politik pada tahun 2020 yaitu 99,93, mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dibandingkan dengan tahun 2019 yang nilainya 100,00 (lihat Tabel 2.12). Nilai variabel tersebut dipengaruhi oleh menurunnya nilai salah satu indikator yang terdapat di dalamnya, sedangkan indikator lainnya masih pada posisi yang sama seperti pada tahun 2019.

Dari Tabel 2.12. terlihat bahwa penyebab menurunnya nilai indeks untuk variabel Peran Partai Politik adalah turunnya nilai indikator jumlah perempuan dalam pengurusan partai politik ditingkat provinsi sebesar 0,67 poin, dimana nilainya pada tahun 2019 adalah 100,00 dan pada tahun 2020 nilainya menjadi 99,33.

Tabel 2.12

Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran Partai Politik

| NO | INDIKATOR | 2019 | 2020 |
|--------------------------------------|---|---------------|--------------|
| 23 | Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu | 100,00 | 100,00 |
| 24 | Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi | 100,00 | 99,33 |
| Variabel Peran Partai Politik | | 100,00 | 99,93 |

2.4.4 Variabel Peran Birokrasi Pemerintah

Nilai variabel Peran Birokrasi Pemerintah di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar 68,73 naik (1,20 poin) jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 67,53. Meskipun nilai Variabel Peran Birokrasi Pemerintah tahun 2020

mengalami kenaikan, namun capaian kinerjanya masih berada dalam kategori “sedang”.

Perubahan angka Variabel Peran Birokrasi Pemerintah pada periode 2019-2020 dipengaruhi oleh kenaikan nilai indikator kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN sebesar 2,63 poin (dari 28,95 menjadi 31,58), sedangkan nilai indikator upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah masih sebesar 100,00 (lihat tabel 2.13).

Tabel 2.13
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran Birokrasi Pemerintah

| NO | INDIKATOR | 2019 | 2020 |
|--|--|--------------|--------------|
| 25 | Kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN | 28,95 | 31,58 |
| 26 | Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah | 100,00 | 100,00 |
| Variabel Peran Birokrasi Pemerintah | | 67,53 | 68,73 |

2.4.5 Variabel Peran Peradilan yang Independen

Nilai variabel Peran Peradilan yang Independen di Provinsi Riau tahun 2020 mencapai 100,00. Angka ini tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2019, begitu juga dengan capaian kinerja variabel ini masih berada pada kategori “baik”.

Capaian nilai variabel Peran Peradilan yang Independen dipengaruhi oleh 2 indikator pembentuknya yaitu: Indikator keputusan hakim yang

kontroversial dan penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi. Nilai kedua indikator tersebut sama-sama telah mencapai angka 100,00. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan yang independen terlaksana dengan baik di Provinsi Riau selama tahun 2020.

Tabel 2.14
Nilai Indeks Masing-masing Indikator dalam Variabel Peran Peradilan yang Independen

| NO | INDIKATOR | 2019 | 2020 |
|---|--|---------------|---------------|
| 27 | Keputusan hakim yang kontroversial | 100,00 | 100,00 |
| 28 | Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi | 100,00 | 100,00 |
| Variabel Peran Peradilan yang Independen | | 100,00 | 100,00 |

kesimpulan



IDI PROVINSI RIAU 2020 : 76,86



1 KESIMPULAN

IDI Provinsi Riau 2020 sebesar 76,86 meningkat (1,65 poin) dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 75,21. Perubahan angka IDI Provinsi Riau pada periode 2019-2020 dipengaruhi oleh peningkatan Aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,93 poin (dari 85,15 menjadi 86,08), Aspek Hak-hak Politik sebesar 3,72 poin (dari 61,68 menjadi 65,40) namun mengalami penurunan pada Aspek Lembaga Demokrasi sebesar 0,73 poin (dari 84,19 menjadi 83,46). Meskipun nilai IDI Provinsi Riau tahun 2020 mengalami peningkatan, namun tingkat demokrasi Provinsi Riau tetap berada dalam kategori "sedang".

Jika dilihat lebih dalam, dari 11 variabel IDI Provinsi Riau, terdapat 4 variabel yang mengalami kenaikan indeks, 5 variabel yang mengalami penurunan dan 2 variabel tidak mengalami perubahan. Empat variabel yang mengalami kenaikan antara lain : Kebebasan Berkeyakinan, Hak Memilih dan Dipilih, Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan, serta Peran Peran Birokrasi Pemerintah. Variabel yang mengalami penurunan antara lain : Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Kebebasan Berpendapat, Kebebasan dari Diskriminasi, Peran DPRD, dan Peran Partai Politik. Sementara variabel yang tidak mengalami perubahan antara lain: Pemilu yang Bebas dan Adil, dan Peran Peradilan yang Independen.

Dari 4 variabel yang mengalami kenaikan indeks, Variabel Kebebasan Berkeyakinan mengalami peningkatan tertinggi, yaitu 7,22 poin (dari 83,55 menjadi 90,77) dan diikuti oleh Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan dengan kenaikan 6,52 poin (dari 52,72 menjadi 59,24), sementara itu dari 5 variabel yang mengalami

penurunan indeks, Variabel Kebebasan dari Diskriminasi mengalami penurunan indeks tertinggi yaitu sebesar 11,00 poin, dari 93,47 pada 2019 menjadi 82,47 pada 2020. Hal ini disebabkan masih adanya kejadian ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender etnis, terhadap kelompok rentan lainnya.

Penurunan tertinggi kedua terjadi pada variabel Peran DPRD yang turun 5,01 poin, dari 73,55 pada tahun 2019 menjadi 68,54 pada tahun 2020. Penurunan ini dapat terlihat dengan semakin menurunnya jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif dan Perda yang merupakan inisiatif DPRD tahun 2020.

Selanjutnya penurunan tertinggi ketiga sebesar 4,88 poin, terjadi pada variabel Kebebasan Berpendapat dengan nilai 60,41 pada tahun 2019 menjadi 55,53 pada tahun 2020. Hal ini dapat terlihat adanya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2013. *Tantangan Konsolidasi Demokrasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adab Berdemokrasi*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2014. *Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Indeks Demokrasi Indonesia: Pedoman Teknis Tata Cara Pengumpulan Data*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2015. *Indeks Demokrasi Indonesia: Petunjuk Teknis Tata Cara Pengumpulan Data*. Jakarta: BPS.
- Kementerian. 2018. *Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2017*. Citra demokrasi Indonesia Minim Kapasitas, Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2020. Berita Resmi Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau Tahun 2019. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau
- _____. 2019. *Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2017 – 2018*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.
- _____. 2020. *Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau Tahun 2018 – 2019*. Pekanbaru: BPS Provinsi Riau.

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik
Provinsi Riau
Jl. Pattimura No. 12 Pekanbaru, 28131
Telp. (0761) 23042, Fax. (0761) 21336
Homepage://riau.bps.go.id, Email: bps1400@bps.go.id

ISSN 2657-0874



9 772657 087406 >